



=====
**KAJIAN ETIKA BISNIS TERHADAP KEBIJAKAN PERUSAHAAN LISTRIK
NEGARA (PLN) MENAIKKAN TARIF DASAR LISTRIK DALAM RANGKA
MEMENUHI KEBUTUHAN LISTRIK MASYARAKAT INDONESIA**

Oleh: Eka Wahyu Kasih

Roshita Septiani

Sanjaya Kusuma

Abstraksi

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji isu etika bisnis menggunakan teori-teori etika yang ada. Kajian dalam artikel ini adalah kebijakan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menaikkan tarif dasar listrik sebesar 15% pada tahun 2013 secara bertahap pada pelanggan dengan daya listrik diatas 900 VA. Kajian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan mengkaji kebijakan yang diambil oleh PLN. Dari kajian ditemukan bahwa tindakan PLN mengambil kebijakan tersebut dapat dikatakan beretika dan dapat dikatakan juga tidak beretika.

Kata Kunci : Etika Bisnis, Teori Etika, PT PLN (Persero)

A. Latar Belakang

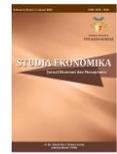
Penerapan etika bisnis dalam suatu perusahaan adalah hal yang sangat penting, tentunya penerapan dari etika bisnis tersebut tidak semudah dengan teorinya. Tentunya banyak isu-isu yang menjadi sebuah dilema dalam etika bisnis yang perlu dibahas lebih mendalam. Perusahaan Listrik Negara (disingkat PLN) adalah sebuah BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkitan tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai sejak perusahaan swasta Belanda NV. NIGM memperluas usahanya di bidang tenaga listrik, yang semula hanya bergerak di bidang gas. Kemudian meluas dengan berdirinya perusahaan swasta lainnya.

Sebagai perusahaan yang menyediakan jasa kepada masyarakat tentunya ada beberapa permasalahan yang dialami PLN. Permasalahan yang di hadapi PLN adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas Terpasang tidak memadai untuk kebutuhan yang ada. Karena 10 tahun terakhir PLN tidak dianggap *viable* untuk mendapatkan pinjaman komersial, akibat tarif



- listrik di bawah biaya pokok produksi (*Cost of Goods Sold*), sehingga PLN hanya mengoptimalkan pembangkit listrik dan jaringan transmisi/distribusi yang ada.
2. Pembangkit listrik yang berbasis batu bara tidak mendapatkan pasokan batu bara yang high grade, karena para pengusaha batu bara lebih suka menjual *high grade* batu bara ke LN dengan harga batu bara yang tinggi, sedangkan yang *low grade* di *supply* ke PLN dikarenakan patotan harga batu bara dari PLN rendah. Agak ironis memang, dimana Indonesia terutama kalimantan yang kaya akan batu bara mensupply *high grade* LN atau ke *buyer* yang mau beli mahal, sedangkan yang *low grade* diberikan pada PLN. Mungkin PLN perlu renegotiate harga batu bara, Jika PLN mendapatkan batu bara yang *low grade* sudah tentu kapasitas terpasang tidak bisa optimal.
 3. Pertambahan pelanggan baru terus bertambah mengikuti pertumbuhan jumlah hunian/rumah baru, industri dan naiknya kebutuhan di rumah tangga karena tambahan peralatan elektronik, namun ini tidak sejalan dengan pertambahan pembangkit listrik/kapasitas.
 4. Tingkat kebocoran/pencurian listrik yang tinggi (20-30%). Sebagai contoh banyak lampu-lampu penerangan umum baik dikota-kota, kelurahan, kecamatan menyambung langsung dan tanpa bayar ke PLN. Belum lagi pencurian-pencurian listrik lainnya yang sangat sulit diatasi. Pencurian listrik memang masih menjadi musuh utama dan telah secara intensif dan sistematis diberantas. Namun bak kata pepatah, maling selalu lebih dulu dari polisi. Angka total *losses* (terdiri dari teknis dan non teknis) realisasi 2007 adalah sebesar 9,06%. Secara teori, *losses* teknis yang *acceptable* untuk sistem sebesar PLN pada kisaran 7%, sehingga *losses* non teknis yang dapat berasal dari pencurian listrik maksimum 2,06%. Dalam masyarakat awam *losses* ini sering diterjemahkan sebagai kebocoran yang berkonotasi negatif (boros, inefisien, dll), yang tidaklah benar 100 persen. Analogi dengan tekanan air pada pelanggan PAM, meskipun pipa PAM tidak bocor, tetap saja tekanan air di pelanggan yang berlokasi dekat pompa/stasiun PAM, pasti lebih tinggi daripada di lokasi yang lebih jauh. Itulah yang namanya *losses* teknis. Adapun *losses* non teknis, disamping akibat pencurian, juga bisa disebabkan oleh kesalahan pencatatan meter (manual), kWh meter yang belum ditera ulang, faktor meter untuk pengukuran tidak langsung, dan lain-lain. Namun perlu diingat, angka *losses* suatu perusahaan listrik tidak dapat begitu saja dibandingkan (*apple to apple*), karena faktor-faktor konfigurasi jaringan, sebaran konsumen, jenis penghantar, tingkat konsumsi, dan lain-lain juga menjadi faktor dominan.
 5. Pembangkit listrik tenaga air yang mulai berkurang kapasitasnya karena terjadi pendangkalan waduk.
 6. Tingkat tunggakan bayar para pelanggan PLN juga telah menyebabkan gangguan *cash flow* di PLN.
 7. Regulasi Pemerintah dan pertimbangan politik lainnya membuat beberapa pejabat pemerintah mencari aman dan tidak berani bertindak tegas.



-
8. Pembangkit tenaga nuklir yang belum bisa direalisasikan. Ini persoalan politis dan sosial.
 9. Effisiensi di PLN yang belum optimal.

Dari permasalahan yang dihadapi oleh PLN tentunya PLN akan membuat sebuah kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Terkadang kebijakan yang dibuat PLN tidak sepenuhnya diterima dengan baik oleh masyarakat, berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas tentunya kebijakan tersebut akan terkait dengan isu-isu etika bisnis. Artikel mencoba melakukan kajian telaah literatur mengenai konsep etika bisnis yang ideal dengan kebijakan yang dibuat oleh PLN. Tujuan dari kajian tersebut adalah untuk mengungkap dilema etika dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

Apakah kebijakan tersebut beretika atau tidak beretika bila di tinjau dengan beberapa teori etika?

C. Tiga Aspek Pokok dari Bisnis

Bisnis modern merupakan realitas yang amat sangat kompleks, banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kegiatan bisnis. Sebagai kegiatan sosial, bisnis dengan banyak cara terjalin dengan kompleksitas masyarakat modern itu, sebab bisnis sebagai kegiatan sosial yang disoroti sekurang-kurangnya dari tiga sudut pandang yang berbeda tetapi tidak selalu mungkin dipisahkan tiga sudut pandang yang berbeda diantaranya sebagai berikut :

1. Sudut pandang ekonomis

Berdasarkan sudut pandang ekonomis, bisnis yang baik adalah bisnis yang membawa banyak untung.

2. Sudut pandang hukum

Berdasarkan sudut pandang hukum tentunya bisnis terkait dengan hukum bisnis dan hukum dagang. Dari segi norma, hukum bahkan lebih jelas dan pasti daripada etika, karena peraturan hukum dituliskan hitam atas putih dan ada sanksi tertentu, bila terjadi pelanggaran.

3. Sudut pandang moral

Berdasarkan sudut pandang moral bisnis yang baik adalah bisnis yang menghormati kepentingan dan hak orang lain karena tidak semuanya bisa dilakukan untuk mencari keuntungan saja. Dari sudut pandang tersebut ada beberapa tolok ukur dari ketiga sudut pandang tersebut diantaranya hati nurani, kaidah emas, dan penilaian umum



D. Teori Etika

Teori Utilitarisme

Berasal dari bahasa latin *utilis* yang berarti “bermanfaat”. Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan.

Deontologi

Deontologi (*Deontology*) berasal dari kata dalam Bahasa Yunani yaitu : deon yang artinya adalah kewajiban. Dalam suatu perbuatan pasti ada konsekuensinya, dalam hal ini konsekuensi perbuatan tidak boleh menjadi pertimbangan. Perbuatan menjadi baik bukan dilihat dari hasilnya melainkan karena perbuatan tersebut wajib dilakukan. Deontologi menekankan perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya. Tujuan yang baik tidak menjadi perbuatan itu juga baik. Di sini kita tidak boleh melakukan suatu perbuatan jahat agar sesuatu yang dihasilkan itu baik, karena dalam teori deontologi kewajiban itu tidak bisa ditawar lagi karena ini merupakan suatu keharusan.

Teori Hak

Teori hak adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan dan perilaku. Dalam teori ini dikatakan bahwa suatu perbuatan adalah baik jika sesuai dengan hak manusia.

Teori Keutamaan

Teori keutamaan adalah disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral.

Teori Keadilan

1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah berdasarkan keadilan ini negara harus membagi segalanya dengan cara yang sama kepada para anggota masyarakat.

2. Keadilan Retributif

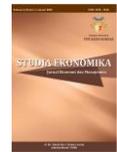
Keadilan ini berkaitan dengan terjadinya kesalahan, hukuman atau denda kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil.

3. Keadilan Kompensatoris

Keadilan ini juga menyangkut kesalahan yang dilakukan, tetapi menurut aspek lain. Berdasarkan keadilan ini orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada orang atau instansi yang dirugikan.

E. Metodologi Penelitian

Dalam artikel ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat [deskriptif](#) dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan [induktif](#). Data yang dikumpulkan bukan berupa



=====

angka-angka melainkan data tersebut berasal dari dokumen pribadi, catatan, memo dan dokumen resmi lainnya.

F. Analisa dan Pembahasan

Salah satu kebijakan yang telah dibuat PLN pada akhir-akhir ini mengenai kenaikan tarif dasar listrik sebesar 15%, rencana kenaikan tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan skenario kenaikan setelah setiap triwulan. Kenaikan tarif dasar listrik tersebut hanya berlaku untuk pengguna listrik diatas 900 VA. Kenaikan tarif dasar listrik tersebut dilakukan untuk mengurangi beban subsidi listrik guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan rasio elektrifikasi. Tentunya kebijakan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat karena dengan meningkatnya tarif dasar listrik tersebut tentunya akan menambah biaya operasional. Tentunya dengan adanya kebijakan ini biaya operasional perusahaan akan semakin meningkat, sehingga kemungkinan harga jual dari produk-produk dipasaran akan meningkat seiringan dengan meningkatnya biaya operasional mereka. Akan tetapi apabila PLN tidak menaikkan tarif dasar listrik tersebut tentunya akan ada beberapa masyarakat yang tidak teraliri listrik karena sudah ada sekita 1,3 juta orang yang sudah mendaftar sambungan listrik tetapi belum bisa dipenuhi. Selain itu alasan untuk menaikkan tarif tersebut karena biaya operasional PLN cukup besar sehingga subsidi yang diberikan oleh pemerintah tidak mencukupi mengingat bahan bakar yang digunakan oleh PLN adalah Gas, minyak bakar (BBM), Batubara. Konsumsi bahan bakar yang digunakan oleh PLN mayoritas di dominasi oleh batu bara dengan presentase BBM 22,96% sedangkan batu bara 44,06%. Indonesia merupakan salah satu negara yang menghasilkan batu bara dan tentunya hal ini akan mengurangi biaya bahan bakar dari jenis batu bara karena bahan bakar tersebut diproduksi oleh negara sendiri, akan tetapi untuk membangkitkan tenaga listrik negara perlu mengimpor batu bara dari negara lain karena mayoritas batu bara yang ada di Indonesia adalah 'low calories' sedangkan sebagian besar peralatan yang digunakan di pembangkit listrik Indonesia hanya mampu membakar batubara 'high calories' inilah yang membuat Indonesia harus mengimpor batubara 'high calories' setiap tahun. Menurut data PLN, biaya pokok penyediaan (BPP) listrik pada pembangkit PLN yang berbahan bakar minyak sekitar Rp 2.900 per kilowatt hour. Sedangkan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara Rp 400 per kilowatt hour. Bila dirata-ratakan total BPP Indonesia 2012 adalah sekitar Rp 1.100 per kilowatt hour. Sedangkan harga jual listrik disamaratakan yaitu sekitar Rp 720 per kilowatt hour. Dari penjabaran tersebut jelaslah terlihat bahwa biaya produksi listrik jauh lebih besar daripada harga jual listrik itu sendiri. Hal inilah yang turut mendorong kenaikan TDL di tahun 2013. Berdasarkan isu yang terjadi dalam PLN tersebut tentunya akan menimbulkan suatu dilema etika dalam perusahaan tersebut. Etika atau tidaknya suatu tindakan tentunya harus di nilai dari berbagai sisi dengan menggunakan beberapa teori etika berikut ini analisa terhadap kebijakan tersebut :

1. Teori Utilitarisme

Apabila ditinjau dari teori utilitarisme yang mengatakan bahwa suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tetapi manfaat itu bukan bagi satu dua orang saja melainkan



masyarakat secara keseluruhan (dalam hal ini seluruh masyarakat Indonesia) maka kebijakan PLN dalam menaikkan tarif dasar listrik sebesar 15 % secara bertahap adalah tidak etis. Dana yang didapat dari kenaikan tarif ini akan digunakan oleh PLN untuk menutupi pengurangan subsidi yang diberikan oleh pemerintah dan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Dalam tujuan dari kenaikan tersebut yang mendapatkan manfaat hanya sebagian kecil orang sedangkan yang dirugikan lebih banyak lagi. Padahal kenaikan dapat dihindari apabila PLN melakukan efisiensi yang menurut penilaian Badan Pemeriksa Keuangan masih terdapat inefisien pada PLN sebesar Rp 37 Triliun pada tahun 2010. Atas dasar itulah tindakan PLN menaikkan tarif dasar listrik dinilai tidak etis.

2. Teori Deontologi

Kebijakan atas kenaikan tarif dasar listrik tersebut dibuat untuk mengurangi subsidi listrik pada tahun 2013, hal ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kenaikan tarif dasar listrik tersebut juga bertujuan untuk melakukan ekspansi agar beberapa wilayah yang belum dialiri listrik bisa teraliri listrik. Berdasarkan teori deontologi tindakan tersebut dikatakan beretika karena PLN melakukan hal tersebut untuk memenuhi kewajibannya dalam menyediakan listrik kepada seluruh rakyat Indonesia.

3. Teori Hak

Dalam teori hak dikatakan bahwa suatu perbuatan adalah baik jika perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan hak kepada orang yang berhak mendapatkannya. Teori ini selaras dengan teori deontologi karena hak dengan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Kenaikan tarif dasar listrik yang dilakukan oleh PLN bertujuan agar daerah yang belum mendapatkan listrik dapat segera dialiri listrik karena setiap orang berhak untuk mendapatkan listrik. Maka dalam hal ini PLN dapat dikatakan telah melakukan tindakan yang beretika.

4. Teori Keutamaan

Berdasarkan teori keutamaan kebijakan atas kenaikan tarif dasar listrik tersebut beretika. Sumber daya energi listrik harus dijaga agar tidak habis sehingga sumber daya dari listrik tersebut bisa terus digunakan atau terus dikembangkan hingga ke generasi selanjutnya, sehingga dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik tersebut tentunya masyarakat akan lebih menghemat dalam memakai listrik, menjaga sumber daya energi listrik merupakan salah satu keutamaan yang dilakukan oleh PLN sehingga PLN membuat kebijakan tersebut meskipun masyarakat banyak yang menolak atas kebijakan tersebut.

Selain dari teori-teori tersebut diatas kebijakan kenaikan tarif dasar listrik tersebut apabila ditinjau dari etika bisnis, kebijakan tersebut dilakukan untuk memenuhi teori keadilan distributif dimana setiap masyarakat diseluruh Indonesia memiliki hak yang sama untuk menikmati aliran listrik. Dalam kasus ini PLN menaikkan tarif dasar listrik untuk memenuhi teori keadilan distributif tersebut agar seluruh rakyat Indonesia bisa teraliri listrik. Sekitar 29% rakyat Indonesia yang belum teraliri listrik, karena hal itu lah



PLN harus menaikkan tarif dasar listrik agar kebutuhan listrik seluruh masyarakat di Indonesia bisa terpenuhi.

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan di atas maka kebijakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam rangka menaikkan tarif dasar listrik sebesar 15% pada tahun 2013 secara bertahap dapat dinilai beretika dan dapat juga dinilai tidak beretika. Penilaian bergantung pada masing-masing individu yang menilai karena setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Menurut peneliti kebijakan PLN dalam menaikkan tarif dasar listrik dapat dinilai beretika apabila ditinjau dari teori deontologi, teori hak dan teori keutamaan tetapi dalam teori utilitarisme tidak beretika karena membawa dampak yang dapat merugikan banyak orang. Selain itu kebijakan tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia, sehingga untuk memenuhi teori keadilan distributif PLN harus melakukan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik tersebut.

H. Saran

Seharusnya Peralihan BBM dengan batubara pun dapat sangat menguntungkan apabila efisiensinya pun diperhatikan, misalnya dengan penggantian alat pembakaran batubara 'high calories' menjadi 'low calories', dengan begitu Indonesia dapat memenuhi kebutuhan domestik energinya secara independen sehingga PLN tidak perlu mengimpor batu bara karena hal tersebut akan menambah biaya operasional PLN. Permainan politik pemerintah yang sekiranya merugikan banyak pihak pun harus dihilangkan agar kenaikan tarif dasar listrik bisa diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Penelitian Kualitatif* (http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif diakses tanggal 4 Januari 2013).
- Bertens, K. (2000). *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, Seri Filsafat Atmajaya: 21.
- Kompas. 7 November 2012. *Inefisiensi PLN* (<http://nasional.kompas.com/read/2012/11/07/08561676/Inefisiensi.PLN> diakses tanggal 5 Januari 2013).
- Viva news. 29 Oktober 2012, *Menteri ESDM Beberkan Alasan Kenaikan Tarif Dasar Listrik* (<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/363005-menteri-esdm-beberkan-alasan-kenaikan-tarif-dasar-listrik> diakses tanggal 5 Januari 2013)